

SKRIPSI

FUNGSI ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2014/05
Dun
+



OLEH :

RICHARD DUNGGIO

NIM. 039910512

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



**FUNGSI ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



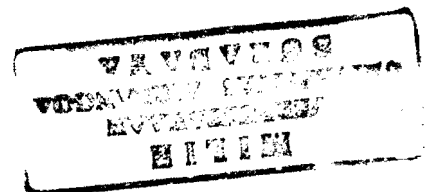
**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366**

Penyusun



**Richard Dunggio
NIM. 039910512**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam tata cara hubungan industrial pancasila setiap perselisihan perburuhan antara buruh dan pengusaha pada awalnya diusahakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, namun bila suatu perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maka terdapat alternatif penyelesaian perburuhan sebelum perselisihan tersebut diserahkan ke P4D dan P4P, yaitu arbitrase yang mana penyelesaian perselisihan perburuhan diselesaikan di luar lembaga peradilan, dan mengingat fungsi arbitrase yang fleksibel maka sangat sesuai apabila diterapkan dalam hal menyelesaikan perselisihan di bidang perburuhan.
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat beberapa keunggulan-keunggulan yang apabila dibandingkan dengan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa yang lain yaitu prosedurnya tidak berbelit-belit, keputusan dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Kerahasiaan akan kerjanya, adanya arbiter yang dapat dipilih sendiri oleh para pihak, keputusan arbitrase umumnya bersifat final and binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). Oleh karena itu dipandang dari keunggulan-keunggulannya maka arbitrase dapat berjalan secara efektif dan berhasil, meskipun di dalam pelaksanaan terdapat kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah kesulitan di dalam

mempertemukan kehendak para pihak yang sedang berselisih, memfasilitasi dari pengusaha yang beritikad buruk untuk memanfaatkan birokrasi melalui jalur peradilan, serta masih kurangnya pemahaman akan UU arbitrase dan pemanfaatannya, campur tangan pengadilan yang terlalu jauh dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase melalui peradilan yang terkadang berjalan tidak lancar.

2. Saran

1. Hendaknya pihak pengadilan tidak terlalu campur tangan terlalu jauh di dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase karena akan mengurangi kredibilitas arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar jalur peradilan.
2. Para pihak didalam memiliki seorang atau lebih arbiter hendaknya benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dan jeli karena para pihak akan mengalami kerugian bila ternyata kurang memiliki pengalaman dan kurang menguasai substansi sengketa yang diperselisihkan. Para arbiter diharapkan mampu memberikan semua kepentingan atau hubungan tertentu yang mana akan menimbulkan keterpihakannya terhadap salah satu pihak yang berselisih.